



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .



## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I           PENDAHULUAN
  - b. BAB II          HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV        PENUTUP

### Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

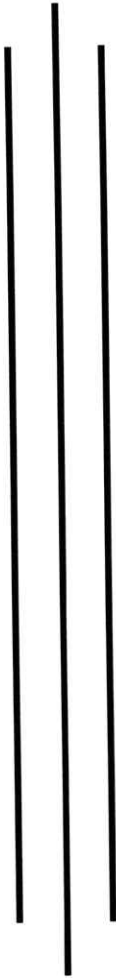


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026



# RENCANA KERJA RENCANA KERJA

**TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
INSPEKTORAT DAERAH**



## KATA PENGANTAR

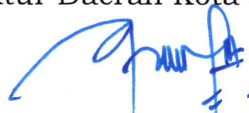
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025  
Inspektur Daerah Kota Batam



Hendriana Gustini, S.Sos, CGCAE  
NIP.19680824 199009 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

DAFTAR GAMBAR ..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah..... 1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah ..... 2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan  
Dokumen Perencanaan Lainnya ..... 2

1.2 Landasan Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
LALU ..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  
Daerah ..... 16

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah ..... 16

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan ..... 16

2.3.3 Peluang dan Tantangan ..... 17

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah  
..... 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 29

3.3 Program dan Kegiatan ..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 36

BAB V PENUTUP ..... 52

5.1 Catatan Penting ..... 52

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ..... 52

5.3 Rencana Tindak Lanjut ..... 53

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam .....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam .....	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Daerah Kota Batam .....	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam .....	26
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026	30
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027 .....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja .....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

#### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana Pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan urusan pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

[illegible]

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen  
Perencanaan Lainnya





## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1539);

11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1546);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam mengacu pada Renstra periode 2025 -2029 sebagaimana Tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
Dari 3 program yang sudah direncanakan, tidak ada satu program pun yang tidak mencapai target.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 89% mencapai 89%.
    - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
  - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
    - a) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.



3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
Dari 3 program yang sudah direncanakan, tidak ada satu program pun yang melebihi target/keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Unsur Pengawasan									
	Bidang Urusan:									
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP PD	76,89					-	-	-
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93,50					-	-	-
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%					-	-	-
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					-	-	-
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen					-	-	-
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%					100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan					88 Orang/bulan	88 Orang/Bulan	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>100%</b>					-	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket					-	-	-
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang					88 Orang	24 Orang	27,27%
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>64,17%</b>	<b>64,17%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	0 Paket	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket					5 Paket	3 Paket	60%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket					4 Paket	3 Paket	75%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit					6 Unit	3 Unit	50%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit					127 Unit	51 unit	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit					-	-	-
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50 %
	<b>Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43,96%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit					1 Unit	1 Unit	58%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit					8 Unit	8 unit	31%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit					55 Unit	24 unit	43,64%
	<b>Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP</b>	<b>100%</b>					-	-	-
		<b>Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1</b>	<b>100%</b>					-	-	-
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>					-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan					12 Laporan	2 Laporan	18,18%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
	Sub Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan					19 Laporan	12 Laporan	63,16%
	Sub Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan					22 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan					1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen					2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1</b>	<b>100%</b>					-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan					2 Laporan	1 Laporan	50%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan					2 Laporan	1 Laporan	50%
	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko	100%					-	-	-
		Persentase pemenuhan pilar IEPK	100%					-	-	-
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%					-	-	-
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Rekomendasi					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Rekomendasi					1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>					-	-	-
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah					43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah					43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan					2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 Perangkat Daerah					17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100%

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1.	Tingkat Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	n.a	
2.	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat			86%	93%	100%	n.a	86%	93%	100%	n.a	
3.	Nilai Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	n.a	Level 3	Level 3	Level 3	n.a	
4.	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			83%	84%	85%	n.a	83%	84%	85%	n.a	
5.	Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B			84%	91%	100%	n.a	84%	91%	100%	n.a	
.	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan			83.60%	83.80%	84.00%	n.a	83.60%	83.80%	84.00%	n.a	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **A. Permasalahan Internal**

1. Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
2. Belum optimalnya peningkatan Kapasitas APIP;
3. Belum optimalnya peralatan kerja teknis;
4. Belum optimalnya penugasan tim pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kompetensinya;
5. Belum adanya standar tentang jangka waktu pelaksanaan dan pembinaan pengawasan secara rinci.

#### **B. Permasalahan Eksternal**

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan mandat tugas dari instansi vertikal yang banyak dan wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perangkat daerah;
4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah;
5. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Analisis terhadap lingkungan internal Inspektorat Daerah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Terdapatnya dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi;
2. Terdapatnya komitmen yang kuat dari pimpinan;
3. Adanya Surat Edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pengawasan urusan pemerintahan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal.
3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM
4. Kurangnya peralatan kerja teknis

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Untuk pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya kerjasama/kolaborasi Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pengawasan internal;
- b. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting, Quality Assurance and Early Warning System*;
- c. Dinamika kebijakan pemerintah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Peraturan dan kebijakan pemerintah penguatan peran Inspektorat;
- b. Kuatnya komitmen pimpinan atas kapabilitas APIP dalam implementasi Pengawasan Intern;
- c. Kuatnya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB;
- d. Kuatnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja;
- e. Adanya mandatori regulasi yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga;
- f. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM;

### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam antara lain:



1. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kota Batam. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sehingga memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada PD sebagai mitra audit. Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi perangkat daerah.
4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara PPUPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara PPUPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	39.165.072.973	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	45.322.302.450	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-	-	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	60.010.000	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.083.000	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.927.000	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	33.700.064.373	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	36.677.383.250	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	33.651.224.373	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	36.628.543.250	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.840.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.840.000	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.561.000.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.936.236.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.000.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	153.918.000	
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	2.500.000.000	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	2.782.318.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.680.000.000</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.643.895.800</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.488.500	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	355.423.400	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	175.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78.431.900	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.116.552.000	
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>824.947.000</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>3.607.566.600</b>	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81 Unit	438.222.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81 Unit	758.193.100	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121 Unit	386.725.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121 Unit	563.444.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.285.929.500	
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>62.061.600</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.360.800</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.061.600	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.349.600	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.011.200	
	<b>Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>337.000.000</b>	<b>Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>326.850.000</b>	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	225.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	224.440.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	70.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	61.530.000	
	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Batam	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti		1.730.000.000	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Batam	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100%	985.456.200	
								Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100%		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Batam	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	1.300.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Batam	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Interna	100%	808.159.800	
		Batam	Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%							
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	250.000.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	404.405.800	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	9.390.000	
	Sub Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	199.432.000	
	Sub Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	36.809.000	
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	700.000.000	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	125.247.000	
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	40.000.000	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	32.876.000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	100%	430.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	100%	177.296.400	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	52.638.000	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	380.000.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	124.658.400	
	<b>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>	<b>100%</b>	<b>2.255.000.000</b>	<b>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>		<b>2.861.796.000</b>	
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>32.082.600</b>	
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Rekomendasi	30.000.000	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Rekomendasi	16.668.600	
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Rekomendasi	25.000.000	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Rekomendasi	15.414.000	
	<b>Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>2.829.713.400</b>	
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	500.000.000	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	887.445.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	250.000.000	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	1.204.381.100	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.100.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	551.099.000	
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 Perangkat Daerah	350.000.000	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 Perangkat Daerah	186.788.300	
	TOTAL :				43.150.072.973					49.169.554.650	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Inspektorat Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Inspektorat Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya tahap pembangunan jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mencapai visi tersebut dicanangkan 8 misi yang disebut Asta Cita. Salah satu misi dari asta cita tersebut merupakan prioritas nasional dalam hal pengawasan yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Pembinaan dan Pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian pembinaan penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

a. Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum.
2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis.

b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a) Pembagian urusan pemerintahan;
- b) Kelembagaan daerah;
- c) Kepegawaian pada perangkat daerah;
- d) Keuangan daerah;
- e) Pembangunan daerah;
- f) Pelayanan publik di daerah;
- g) Kerja sama daerah;
- h) Kebijakan daerah;

- i) Kepala daerah dan DPRD;
- j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pengawasan teknis meliputi:

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, operasi, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri dan Menteri teknis/kepala Lembaga non kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pengawasan, Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri teknis dan kepala pemerintahan non kementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri. Dalam pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintahan non kementerian. Koordinasi dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Independen;
- c. Objektif;
- d. Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan APIP dilakukan pada tahap kegiatan:

- a. Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah laporan hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Inspektorat Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026 Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah: Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator :

Nilai Kapabilitas APIP.

Sasaran 2

Menurunnya tingkat Penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, dengan indikator:

- a. Indeks Manajemen Risiko.
- b. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Sasaran 3

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, dengan indikator:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,313)
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,400)
3	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Indeks Manajemen Risiko	3,225
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,154
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	91,77

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 - 2029 yang dirinci dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Inspektorat Daerah mengusulkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.49.169.554.650,- (empat puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
    - 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
    - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
    - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi
    - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - d. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
    - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027  
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
6.01.01	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP PD</b>		<b>76,89</b>	<b>45.322.302.450</b>			<b>78,97</b>	<b>44.991.846.400</b>
		<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>		<b>93,50</b>				<b>94,50</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</b>		<b>100%</b>	<b>60.010.000</b>			<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>
6.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	29.083.000	APBD		2 Dokumen	33.000.000
6.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Dokumen	30.927.000	APBD		3 Dokumen	22.000.000
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>36.677.383.250</b>			<b>100%</b>	<b>37.174.900.000</b>
6.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	90 Orang/bulan	36.628.543.250	DAU, APBD		90 Orang/bulan	37.100.000.000
6.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	12 Dokumen	48.840.000	APBD		12 Dokumen	74.900.000
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>2.936.236.000</b>				<b>2.905.446.400</b>
6.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Batam	1 Paket	153.918.000	APBD		1 Paket	-
6.01.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	90 orang	2.782.318.000	APBD		90 orang	2.905.446.400
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.643.895.800</b>		<b>100%</b>		<b>1.896.000.000</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
6.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Batam	1 Paket	58.488.500	APBD		1 Paket	70.000.000
6.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	5 Paket	355.423.400	APBD		5 Paket	385.000.000
6.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Batam	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
6.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	4 Paket	78.431.900	APBD		4 Paket	93.500.000
6.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	1 Paket	35.000.000	APBD		1 Paket	27.500.000
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>3.607.566.600</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2.050.000.000</b>
6.01.01.2.07.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	-	-			3 Unit	1.500.000.000
6.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	50 Unit	758.193.100	APBD		25 Unit	300.000.000
6.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	50 Unit	300.000.000	APBD		25 Unit	100.000.000
6.01.01.2.07.00010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Batam	5 Unit	2.285.929.500	APBD		-	-
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>70.360.800</b>			<b>100%</b>	<b>77.000.000</b>
6.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	38.349.600	APBD		12 Laporan	33.000.000
6.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	32.011.200	APBD		12 Laporan	44.000.000
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>326.850.000</b>			<b>100%</b>	<b>833.500.000</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
6.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Batam	1 Unit	40.880.000	APBD		1 Unit	66.000.000
6.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	8 Unit	224.440.000	APBD		11 Unit	412.500.000
6.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	30 Unit	61.530.000	APBD		35 Unit	55.000.000
6.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	-	-	-		1 Unit	150.000.000
6.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Batam	-	-	-		1 Unit	150.000.000
6.01.02	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP		100%	985.456.200			100%	1.413.500.000
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1		100%				100%	
6.01.02.2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	808.159.800			100%	1.155.000.000
6.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	15 Laporan	404.405.800	APBD		15 Laporan	275.000.000
6.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Batam	1 Laporan	9.390.000	APBD		1 Laporan	165.000.000
6.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan : Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Batam	20 Laporan	199.432.000	APBD		20 Laporan	132.000.000
6.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan : Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Batam	2 Laporan	36.809.000	APBD		2 Laporan	165.000.000
6.01.02.2.01.0006	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Batam	1 Kesepakatan	125.247.000	APBD		1 Kesepakatan	330.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
6.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Batam	2 Dokumen	32.876.000	APBD		2 Dokumen	88.000.000
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1</b>		<b>100%</b>	<b>177.296.400</b>			<b>100%</b>	<b>258.500.000</b>
6.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Batam	1 Laporan	52.638.000	APBD		1 Laporan	93.500.000
6.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Batam	4 Laporan	124.658.400	APBD		4 Laporan	165.000.000
<b>6.01.03</b>	<b>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko</b>		<b>100%</b>	<b>2.861.796.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.837.000.000</b>
		<b>Persentase pemenuhan pilar IEPK</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>		<b>100%</b>	<b>32.082.600</b>			<b>100%</b>	<b>132.000.000</b>
6.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Batam	1 Rekomendasi	16.668.600	APBD		1 Rekomendasi	55.000.000
6.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Batam	1 Rekomendasi	15.414.000	APBD		1 Rekomendasi	77.000.000
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>		<b>100%</b>	<b>2.829.713.400</b>			<b>100%</b>	<b>1.705.000.000</b>
6.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	45 Perangkat Daerah	887.445.000	APBD		45 Perangkat Daerah	385.000.000
6.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Batam	45 Perangkat Daerah	1.204.381.100	APBD		45 Perangkat Daerah	330.000.000
6.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	2 Kegiatan	551.099.000	APBD		2 Kegiatan	825.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
6.01.03.2.02.0004	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Batam	17 Perangkat Daerah	186.788.300	APBD		17 Perangkat Daerah	165.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>49.169.554.650</b>				<b>48.242.346.400</b>



#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Inspektorat Daerah Kota Batam pada perencanaan Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Wali Kota, Inspektorat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 34 (tiga puluh empat) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dalam pelayanan pengawasan urusan pemerintahan

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD